

PERAN ORMAS SEAZAS DALAM MEMBANGUN DINAMIKA INTERNAL PARTAI NASIONAL INDONESIA TAHUN 1946 - 1962

DIMAS ANGGARA

S1 Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : dimasanggarasby@gmail.com

Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Partai Nasional Indonesia merupakan salah satu partai politik yang mengawali pembangunan pondasi politik di Indonesia. Partai ini terbentuk pada tahun 1946, dengan semangat membawa kembali ideologi PNI yang berdiri pada tahun 1927 oleh Soekarno, Marhaenisme. Serikat Indonesia yang kemudian menjadi PNI disepakati pada tahun 1946 pada kongres di Kediri pada 28 Januari 1946. Pemilu tahun 1955, sebagai pemilu pertama di Indonesia menjadikan partai – partai politik yang ada di Indonesia semakin banyak meningkatkan kerja partai dalam rangka meraih pundi – pundi suara partai. Sebagai konsekuensi PNI sebagai salah satu partai peserta pemilu mendirikan ormas partai menjadi pilihan kebijakan partai. Pada 1947 hingga 1954 berdiri empat ormas PNI yang selanjutnya diakui sebagai ormas seazas, Pemuda Demokrat Indonesia, Persatuan Tani Indonesia, Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dalam perkembangannya ke empat ormas seazas ini banyak mengisi dinamika internal partai hingga kehancuran PNI paska tahun 1965.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin; 2) Mengetahui peran ormas seazas PNI dalam membangun dinamika internal PNI pada tahun 1947 – 1962; 3) Mengetahui dinamika internal PNI pada tahun 1947-1962. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode heuristik, kritik dan interpretasi sumber, serta historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjalanan Peran Ormas Seazas dalam membangun Dinamika Internal Partai Nasional Indonesia pada tahun 1946-1962. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setting penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Pusat PNI dan Ormas seazas PNI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi internal Partai Nasional Indonesia pada sepanjang tahun 1946 – 1962. 1) Kondisi politik Indonesia sepanjang tahun 1950 – 1959 menunjukkan bahwa pondasi politik yang terbangun melalui pemilu tahun 1955 menjadikan banyak partai semakin gencar dalam melakukan perbaikan kinerja organisasi. 2) Ormas seazas yang diakui oleh PNI yakni, PDI, PETANI, GMNI, KBKI. Organisasi – organisasi ini memiliki peran penting dalam perkembangan partai, karena setelah terbentuknya Front Nasional, Kesatuan Aksi Massa Marhaen, kerja – kerja partai dan ormas menjadi satu. Selain itu ormas dijadikan sumber regenerasi kader bagi faksi – faksi yang ada di tubuh PNI serta ormas juga dijadikan sebagai alat kontrol partai secara moral jika partai dianggap melenceng dari ideologi partai . 3) Keretakan didalam tubuh PNI menguat setelah perumusan indoktrinasi Marhaenisme, kekalahan telak pada pemilu daerah pada tahun 1957 dan juga sikap partai yang tidak mendukung peraturan presiden yang melarang pegawai negeri untuk menjadi anggota partai, setelah Kongres kesepuluh, Ali sebagai ketua dan Surachman sebagai sekjend melakukan pembersihan partai dari unsur – unsur konservatif secara utuh.

Kata kunci : Dinamika, Ormas, Partai Nasional Indonesia, faksi

Abstract

The Party National Indonesia is one of the political parties that started the construction of political foundation in Indonesia. The party was formed in 1946, with the spirit of bringing back the PNI ideology that was founded in 1927 by Sukarno, Marhaenism. Serikat Indonesia which later became PNI was agreed in 1946 at the congress in Kediri on January 28, 1946. The election of 1955, as the first election in Indonesia to make political parties in Indonesia increasingly increasing the work of the party in order to seize the party votes . As a consequence of the PNI as one of the parties participating in the election established the party mass organizations to be the party's policy choice. From 1947 to 1954 there were four PNI mass organizations, which were later recognized as mass organizations, Democrat Youth Indonesia, Indonesian Peasant Union, Indonesian Democratic Labor Unity and Indonesian National Student Movement (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). In its development to the four mass organizations this much fill the internal dynamics of the party until the destruction of the PNI paska 1965.

Based on this background, the formulation of the problem in this research is as follows: 1) Knowing the political condition of Indonesia in the early days of independence to guided democracy; 2) To know the role of mass organizations of the PNI in building the internal dynamics of the PNI in 1947 - 1962; 3) Knowing the internal dynamics of the PNI in 1947-1962. The data collection technique is done by heuristic method, criticism and source interpretation, and historiography. This study aims to describe the journey of the Role of Organizations Seazas in building the Internal Dynamics of the National Party of Indonesia in 1946-1962. This research uses qualitative approach. The research setting was carried out at the PNI Central Executive Board and CSOs.

The results of this study indicate that the internal condition of the National Party of Indonesia during 1946-1962. 1) The political condition of Indonesia throughout 1950 - 1959 indicates that the political foundations built through the elections in 1955 made many parties more vigorous in improving the performance of the organization. 2) Mass organizations recognized by the PNI namely, PDI, PETANI, GMNI, KBKI. These organizations have an important role in the development of the party, because after the formation of the National Front, the Marhaen Mass Action Union, the work of the parties and mass organizations become one. In addition, mass organizations are used as a source of cadre regeneration for factions in the PNI and mass organizations are also used as a party control tool morally if the party is considered deviated from party ideology. 3) The rift within the PNI strengthened after the formulation of Marhaenism indoctrination, a landslide defeat in the regional elections in 1957 as well as a party stance that did not support the presidential regulation which prohibited civil servants to become party members after the tenth congress, Ali as chairman and Surachman as secretary Party cleansing of conservative elements in its entirety.

Keywords : Dynamics, Mass Organisation, Party National Indonesia, factions

PENDAHULUAN

Sejarah politik Indonesia kaya akan bahan untuk dijadikan sebagai sumber studi perbandingan tentang partai politik. Periode selama dua puluh tahun awal kemerdekaan Indonesia menjadi sangat menarik untuk dikaji, terutama jika melihat peran partai politik yang memainkan peranan penting dalam melangsungkan fungsi politiknya. Partai – partai pada masa ini sangat beragam, mulai dari ciri kepemimpinan dan terutama dalam ranah ideologi. Perubahan struktur politik sepanjang 1945-1959 dari sistem presidensial, ke sistem parlementer hingga Demokrasi Terpimpin secara langsung membentuk lingkungan politik yang sama sekali berbeda bagi partai – partai politik yang berkembang pada masa sebelum kemerdekaan khususnya.¹

Salah satu penanda zaman dalam pencatatan politik pemilihan umum di Indonesia adalah pemilihan umum pertama ditahun 1955. Pemilihan umum yang menjadikan PNI sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak yang kemudian secara berurutan dibawahnya yakni Masyumi, Nahdhatul Ulama dan PKI. Hasil pemilihan umum 1955 menjadi titik balik secara formal bagi parlemen sebelumnya yang merupakan hasil arena persaingan antar elite partai.²

1. J. Eliseo Rocamora, *Nasionalisme Mencari Ideologi, bangkit dan runtuhnya PNI 1946-1962* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti).1991, hal. 10

² Miriam S. Budiarjo, *The Provisional Parliament Of Indonesia* , Far Eastern Survey, XXV:2, 1981 hal. 17-23

METODE

Heuristik merupakan suatu langkah dalam penelitian sejarah, seorang peneliti sejarah harus mengumpulkan sumber-sumber, bahan-bahan, dan arsip-arsip sejarah yang berhubungan dengan peristiwa sejarah yang akan diteliti. Peneliti berusaha mencari sumber-sumber arsip yang berupa dokumen dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini. perincian tersebut dilakukan diruang arsip milik badan arsip kota surabaya. sumber-sumber dalam heuristik itu sendiri terdiri dari :

- a. Sumber primer, merupakan suatu dokumen atau informasi lain yang diciptakan pada waktu atau sekitar waktu peristiwa sejarah yang akan diteliti tersebut terjadi.
- b. Sumber sekunder, merupakan suatu bentuk informasi yang berbentuk karya sejarah yang ditulis berdasarkan sumber-sumber primer, biasanya merujuk ke sumber lainnya. Sumber sekunder ideal biasanya mengandung laporan peristiwa di masa lampau berikut generalisasi, analisis, sintesis, intepretasi, dan atau evaluasi terhadap peristiwa itu sendiri. Sumber-sumber terdiri dari :

Rocamora, J. Eliseo. *Nasionalisme mencari Ideologi bangkit dan runtuhnya PNI 1946-1962*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 1991

Kahin, McTurnan George. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Depok : Komunitas Bambu. 2013.

Feith, Herberth. *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*. Jakarta : Equinox Publishing.

Lev, Daniel S. *The Political Parties In Indonesia*. Ithaca : Journal of South East Asian Studies.

Aminuddin Kasdi. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Dhakidae, Daniel. *Soekarno, Membongkar sisi – sisi Hidup Putra Sang Fajar*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas. 2013.

Sjamsuddin, Nazaruddin. *PNI dan Perpolitikannya*. Jakarta : CV Rajawali. 1984.

2. Kritik

Pekerjaan utama dalam merekonstruksi sejarah, setelah menentukan pokok persoalan yang akan dikaji ialah mengumpulkan sumber yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah menyeleksi, menilai, memilah dan menguji sumber yang benar – benar diperlukan, mengandung data – data dan informasi yang relevan dengan pokok kesejarahan yang akan disusun. Dalam tahap ini penulis berusaha untuk menilai, menguji, serta menyeleksi sumber – sumber yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan sumber yang autentik (asli). Kritik sumber terdiri atas kritik ekstern dan kritik intern, dalam tahap pertama melakukan kritik ekstern yaitu mengkaji terkait keaslian sumber tersebut setelah itu baru dilakukan kritik intern.

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern dilakukan pada keadaan luar yang tampak pada arsip yang telah ditemukan. Apakah arsip tersebut sesuai dengan waktu peristiwa terjadi bisa dikaji ulang. Dari arsip yang ditemui, kertas dari arsip tersebut sudah usang dimakan waktu dan berbahasa Belanda. Melihat dari kondisi fisik arsip seperti dari kertas, bahasa, dan penulisannya, penulis mencoba mencocokkan dengan tahun atau masa arsip tersebut diterbitkan sudah relevan atau belum.

b. Kritik Intern

Kritik intern adalah suatu cara untuk menilai bagaimana isi dari sebuah arsip yang ditemukan. Apakah isi dari arsip tersebut layak untuk dipakai sebagai sumber dalam penulisan ini. penulis berusaha untuk mencocokkan isi dari arsip-arsip yang ditemukan dengan sumber arsip lainnya ataupun dengan sumber terbitan buku).

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran terhadap sumber atau data sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Pada tahap ini penulis menafsirkan fakta sejarah yang telah ditemukan melalui proses kritik sumber sehingga akan terkumpul bagian – bagian yang akan menjadi fakta serumpun. Pada tahap interpretasi atau penafsiran ini penulis melakukan penafsiran terhadap sumber – sumber yang sudah mengalami kritik intern dan ekstern dari data – data yang diperoleh guna menyambungkan fakta – fakta yang masih berserakan.

4. Historiografi

Pada tahap terakhir ini penulis akan memaparkan secara sistematis, terperinci, utuh dan komunikatif. Dalam tahap ini kemudian menghasilkan sebuah laporan penelitian dengan bukti-bukti yang sudah dianalisis dan dianggap penulis sebagai bukti yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Politik Indonesia 1950 - 1959

Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer sejak tahun 1950 yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, sehingga masa ini disebut masa demokrasi liberal. Indonesia dibagi menjadi 15 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan UUDS tahun 1950. Pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Demokrasi liberal berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejak sistem multi-partai berlaku melalui Maklumat Pemerintah. Sistem multi-partai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan UUD 1945 periode pertama. Di Indonesia, demokrasi liberal mengalami perubahan-perubahan kabinet yang mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Demokrasi liberal secara formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 setelah dikeluarkannya dekrit presiden, sedang secara material berakhir pada saat gagasan Demokrasi Terpimpin dilaksanakan.

Demokrasi Liberal disebut juga Demokrasi Parlementer, tapi tanpa parlemen yang sesungguhnya sampai diselenggarakannya pemilihan umum pertama tahun 1955. Dengan demikian, periode Demokrasi Liberal yang sesungguhnya baru dimulai setelah pemilihan umum pertama itu, sekalipun dalam praktiknya telah berjalan sejak November 1945³ Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur).⁴

Kegagalan Konstituante untuk melaksanakan sidang-sidangnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.³⁸ Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik diantaranya Soewirjo ketua umum PNI mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Waktu itu pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar 1945

³ Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1962, hal. 122

⁴ Ibid

dianggap sebagai langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut: (1) Pembubaran Konstituante. (2) berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, (3) Pembentukan MPRS.⁵

Demokrasi Terpimpin telah menyederhanakan struktur politik dengan memusatkan kekuatan di dua lembaga antara Soekarno dan Angkatan Darat sedangkan PKI sebagai partai politik dengan basis massa yang besar menjadi kekuatan ketiga. Sistem Demokrasi Terpimpin ini kemudian dikemas dalam tiga kekuatan besar yakni Soekarno, Angkatan Darat dan Komunis.

Kemudian juga digencarkan indoktrinasi Manipol-Usdek (Manifesto Politik, UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin) jargon politik Soekarno sebagaimana agar rakyat Indonesia agar tidak terbius oleh retorika politik. Rakyat yakin benar bahwa Sekarno adalah figur yang sesuai dengan kriteria-kriteria pemimpin yang dibutuhkan. Soekarno berhasil memikat massa dan membawa pengikutnya ke arah fokus utama kepribadiannya, selain itu Soekarno mampu mengguncang perasaan pendengarnya dengan daya meyakinkan yang sangat besar.

Arah politik luar negeri Indonesia juga terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas-aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada masa itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara kornunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Perwujudan poros anti imperialisme dan kolonialisme itu dibentuk poros Jakarta - Phnom Penh - Hanoi - Peking - Pyong Yang. Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit, karena berkiblat ke negara-negara komunis. Selain itu, pemerintah juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Para pemimpin PKI, Aidit, Njoto, dan lain-lain yang menuliskan statemen politik mereka dalam slogan-slogan Demokrasi Terpimpin dan menegaskan sikap mendukung Manipol juga harus mendukung Nasakom dan Resopim.⁶

Keadaan sosial-politik massa Demokrasi Terpimpin yang lebih condong ke kiri akibat unsur-unsur PKI yang

amat kental. Oleh karenanya yang menjadi obyek jargon-jargon perjuangannya adalah BTI (Barisan Tani Indonesia). BTN adalah organisasi massa petani yang terhubung ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan memberikan Blow up secara besar-besaran selain untuk menarik perhatian dan dukungan sosial-politik, juga menjadi propaganda misi perjuangan PKI. Kasus-kasus aksi sepihak di Jengkol, Kediri (1961), HMI-Utrecht di Jember (1963), kasus Manikebu (1963-1964), kasus Kanigoro, Kras, Kediri (1965) dan masih banyak lagi. Indonesia yang akan dijadikan Negara Komunis lewat berbagai macam cara seperti Landreform telah menimbulkan gesekan dan benturan politik, sosial, budaya dan militer antara sepanjang tahun 1959 dan 1965. Landreform yang dimanfaatkan kaum komunis dengan strategi tidak lepas dari doktrin partai komunis. Jalan revolusi dengan melenyapkan kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap lawan.⁷

B. Partai Nasional Indonesia 1946

Setelah proklamasi kemerdekaan, langkah penting kedua dari Badan Pekerja adalah dengan suatu usul perundang-undangan berikutnya pada hari yang sama itu, 30 Oktober 1945, yang menyarankan agar sistem partai tunggal diganti dengan sistem multi-partai dimana semua aliran politik yang penting punya perwakilan. Presiden segera menyetujuinya, dan persetujuannya ditambah dengan permintaan agar partai-partai sudah terbentuk sebelum diadakan pemilu untuk Dewan Perwakilan Rakyat (yang bakal mengganti KNIP-sementara yang dibentuk tidak berdasarkan pemilu), yang menurut rencana akan berlangsung pada bulan Januari 1946. Dari banyak partai yang berdiri, semula yang terkuat adalah Partai Nasional Indonesia, atau kelak dikenal sebagai PNI. PNI baru ini didukung oleh suatu persentase yang besar dari golongan profesional Republik itu dan mungkin mayoritas pegawai negeri yang sudah bekerja pada pemerintah penjajah sebelum perang. Sejumlah besar kaum cendikiawannya sudah aktif dalam pergerakan kebangsaan sebelum perang. Karena sebagian besar anggotanya adalah bekas anggota PNI lama, mayoritas pemimpinnya rata-rata berusia lebih tua daripada pemimpin partai-partai lainnya.⁸

Semula banyak yang tertarik untuk masuk PNI sehingga jumlahnya demikian membesar, baik karena mereka dulu ikut partai Sukarno sebelum perang, maupun karena pernah ikut partai resmi pemerintah yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan dukungan Sukarno maupun Hatta. Jadi, suatu jumlah besar massa pendukungnya yang mula-mula, berpegang pada pendapat bahwa PNI adalah "partainya Sukarno dan Hatta". Banyak orang Indonesia baru bisa menghilangkan pendapat ini setelah setahun atau lebih, tetapi sementara penulis asing masih tetap berpendapat demikian. Pasca

⁵ Wilopo. *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1976, hal 127

⁶ Kahin, George McT. *Nasionalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952, hal.

⁷ H.Roslan.Abdulgani, 1961, *Penjelasan Manipol-Usdek, Bahan-bahan Indoktrinasi*. A.Reachim. Djember: Penerbit Sumber Ilmu, hlm 149

⁸ Melik, Sayuti. *Antara Marhaenisme dan Marxisme*. Jakarta: Pembimbing Rakyat, 1958, hal 77

kemerdekaan, PNI berdiri di Kediri pada bulan Januari 1946 yang dipimpin oleh pemimpin dari Serindo (Serikat Rakyat Indonesia), sebuah organisasi yang didirikan pada bulan Desember 1945 di Jakarta. Pada kongres di Kediri, Serindo bergabung dengan beberapa partai kecil lainnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dan beberapa kelompok kecil dari Sumatera dan Sulawesi membentuk partai baru, yakni PNI.⁹ Partai ini terdiri atas beberapa kalangan dan berbagai lapisan pekerjaan, seperti pengacara, pegawai negeri, guru, dan sebagainya. Kepemimpinan PNI pascakemerdekaan berada di tangan pemimpin PNI sebelum kemerdekaan, Partindo, Gerindo, dan beberapa orang Parindra. Pada tahun 1947, pemimpin PNI berasal dari kalangan pemimpin PNI sebelum kemerdekaan dan Partindo, yakni Sarmidi Mangunsarkoro, Sartono, dan Sidik Djojokusarto.¹⁰

C. Ormas Seazas PNI

Sepanjang tahun 1946 hingga 1952 PNI tidak mempunyai dasar yang padu di luar organisasi partai itu sendiri. Keorganisasian partai sendiri pun baru pada tahun 1953 memiliki satu tatanan yang padu antar tingkat struktur. Dorongan melakukan reorganisasi ini bersumber dari kebutuhan untuk mengembangkan suatu sistem yang dapat mengkoordinasikan berbagai unit partai melalui sarana komunikasi antar cabang – DPP dan kongres partai. Hal ini terlihat setelah tahun 1950, ketika kedaulatan Indonesia secara resmi pada 1949, jumlah cabang PNI meningkat semakin banyak, terutama di daerah dimana partai ini dilarang oleh belanda. Pada kongres ke empat tahun 1950 PNI memiliki 228 cabang dan meningkat hingga 350 cabang pada kongres ke enam. Melalui kongres ke enam anggaran dasar baru yang mengatur tentang organisasi partai membuat sejumlah perubahan menyeluruh, diantaranya :

a. Keanggotaan partai, jika pada anggaran dasar 1946 hanya mengatur persyaratan umur dan menyetujui azas- azas partai maka dalam anggaran dasar baru menuntut seorang anggota untuk menjadi anggota sementara dalam periode tiga bulan dan membangun dasar untuk menegakkan disiplin partai dengan mewajibkan para anggota baru berikrar untuk mengikuti semua keputusan yang dibuat kongres, DPP dan Dewan Partai.

b. Pimpinan Partai, anggaran dasar baru merumuskan pembagian pimpinan partai di tingkat nasional menjadi DPP dan Dewan Partai, serta menetapkan prosedur pemilihan dan beberapa ketentuan mengenai hubungan antara kedua badan tersebut. Selain itu dalam setiap kongres mengharuskan dipilihnya seorang ketua partai, sekurang – kurangnya seorang wakil ketua, seorang sekretaris jenderal dan dua anggota Dewan Partai. Kelima orang ini lantas memilih sekurang – kurangnya dua puluh anggota dari daftar calon yang disiapkan Dewan Daerah ditambah siapa saja yang mereka putuskan untuk dimasukkan. Dewan Partai

sekurang – kurangnya harus mengadakan rapat sekali dalam enam bulan. Berbeda dengan sebelumnya dimana dewan partai mengadakan rapat sesuai dengan instruksi DPP.

Unit partai di daerah, meskipun pada anggara dasarsebelumnya sudah diatur tentang unit daerah partai mulai tingkat komisariat (provinsi), Dewan daerah (karesidenan), cabang (kabupaten) hingga ranting yang ada di desa – desa ataupun kecamatan, satu - satunya unit partai yang dapat hidup secara efektif disini adalah tingkat cabang. Pada anggara dasar yang baru secara sepenuhnya menata kembali seluruh unit partai di daerah sebagai berikut : 1. Tingkat paling rendah adalah ranting yang dibentuk di tingkat desa dengan syarat minimal 50 anggota yang memiliki hak pilih dan mengadakan rapat ranting untuk memilih ketua ranting baru setiap setengah tahun. 2. Dewan Pimpinan Cabang, sekurang – kurangnya dibentuk oleh dua ranting yang dipilih melalui rapat cabang setiap setengah tahun oleh para utusan ranting. 3. Dewan Pimpinan Daerah yang dibentuk melalui sekurangnya oleh 3 dewan pimpinan cabang dan dipilih saat rapat setiap setengah tahun oleh para utusan cabang.

A. Pemuda Demokrat Indonesia

Pemuda demokrat indonesia didirikan di Solo pada 31 Mei 1947 yang tentunya menggunakan Marhaenisme sebagai Ideologi organisasi. Pada kongresnyayang pertama pada bulan oktober 1947 PDI menyatakan untuk tidak terlibat pada urusan politik praktis yang sedang tumbuh di Indonesia. Organisasi ini memusatkan diri pada tugas – tugas sosial dan pendidikan. Pemuda Demokrat Indonesia pada kongresnya yang kedua memutuskan untuk tidak membentuk satuan gerilya atau laskar, pilihan ini merupakan pilihan yang cukup berbeda disaat organisasi massa yang lainnya berpusat pada pembentukan laskar ketika kondisi Indonesia pada saat itu yang sedang mempertahankan kemerdekaan. Ketua PDI yang pertama adalah Moh. Isnaeni, yang kemudian digantikan oleh Soebagio Reksodipoero hingga Agustus 1954.

Pada kongres ke-tujuh di Malang, 23-28 Oktober 1956, Asnawi Said yang menggantikan Soebago Reksodipoero, digeser dari pimpina PDI. DPP PNI menghendaki Asnawi digeser karena ia menolak melepaskan kursinya di Dewan Konstituante sebagaimana diperintahkan partai. Sebagai gantinya diilih seorang pemimpin yang dianggap lebih patuh kepada kendali partai, Ischak Surjodiputro. Tetapi sebagai pejabat di kementerian penerangan dan anggota Dewan Konstituante, Ischak sangat sibuk sehingga tidak pernah berupaya keras menguasai secara efektif DPP PDI.

B. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 23 Maret 1954, sebagai hasil peleburan tiga organisasi mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Merdeka di Jakarta, Gerakan Mahasiswa Demokrat dan Gerakan Mahasiswa Marhaenis di Surabaya. Ketua nasional GMNI yang terpilih dalam kongresnya yang pertama

⁹ . Liddle, R. William. *Ethnicity, Party and National Integration – An Indonesian Case Study* (New Haven: Yale University Press, 1970), hal. 312

¹⁰ Ibid

pada November 1954 adalah M. Hadiprabowo. Sebagai organisasi yang kecil dan relative baru, GMNI memainkan peranan yang bahkan lebih sedikit dalam PNI daripada ormas PNI lainnya. Ketika GMNI menentang pembentukan Front Pancasila dalam pertemuan pemimpin ormas PNI dengan DPP PNI pada pertengahan 1958, para pemimpin partai secara kasar mengabaikan keberatan GMNI dan tetap maju dengan rencana itu. Para pemimpin GMNI menentang rencana Front Pancasila karena mereka merasa front itu tidak mengambil sikap ideologis secara jelas. Mereka mengatakan lebih lanjut, kebijakan DPP PNI tidak langsung menjawab tantangan Soekarno untuk mengadakan penataan kembali lembaga politik secara mendasar dan pengarahannya kembali politik nasional kiri secara keseluruhan. Pada Januari 1959, GMNI mengejutkan pimpinan PNI dengan mengeluarkan pernyataan yang sepenuhnya mendukung usulan Dewan Nasional tentang Demokrasi Terpimpin yang ditentang PNI.

C. Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia

Partai Nasional Indonesia tidak memiliki organisasi buruh sebagai afiliasi sampai dibentuknya KBKI pada 10 Desember 1952 yang diketuai oleh Saleh Umar (Ketua PNI Sumatera Utara). KBKI merupakan salah satu dari ormas seazas yang diakui oleh PNI pada periode 1952-1960 an. Dalam kurun waktu dua tahun KBKI berhasil menghimpun anggota sebanyak 61.000 orang. Pada tahun 1956 setahun setelah pemilu, KBKI megaku memiliki anggota sebanyak 500.000 orang yang tersebar di 13 provinsi, 81 kota cabang dan 372 kantor atau pabrik. Pada tahun 1958, Ahem Erningpraja yang merupakan ketua umum KBKI menyatakan bahwa KBKI beranggotakan 1.001.775 orang. KBKI kemudian menjelma sebagai ormas seazas PNI yang paling maju diantara ormas seazas yang lain seperti PDI, GMNI ataupun Petani

PNI sebelum memiliki KBKI bukan berarti tidak memiliki hubungan ataupun usaha dalam pengorganisasian di sektor perburuhan. PNI berupaya untuk mendapatkan pengaruh dari organisasi – organisasi buruh melalui upaya para anggota partai seperti Rahendra Koesnan, A.M Datuk, dan Iskadar Wahono yang berada dalam SOBSI. Setelah pecahnya peristiwa Madiun 1948 gejala didalam tubuh SOBSI mulai muncul hingga terpecah menjadi faksi pro-komunis dan anti komunis. Pada 1948 ketiga orang tersebut memimpin pembentukan GSBI (Gabungan Serikat – serikat Buruh Indonesia) yang terdiri dari serikat – serikat buruh yang anti komunis.

Pertumbuhan KBKI yang pesat pada masa itu antara lain karena organisasi ini langsung melayani parah buruhnya dan menjadi sumber dukungan politik bagi partai. Organisasi ini memang aktif menjaga kepentingan anggotanya, sebagaimana serikat buruh lainnya. Meskipun SOBSI milik PKI tetap merupakan serikat buruh terbesar, pada masa itu KBKI tumbuh jauh lebih pesat daripada SOBSI ataupun serikat buruh lainnya. Ketika Masyumi dan PSI semakin terkucil secara politis setelah pertengahan 1957, semakin banyak serikat buruh yang bersekutu dengan SBII dan KBSI masuk ke dalam KBKI. Keuntungan lain yang diperoleh KBKI

dibandingkan dengan serikat buruh lainnya adalah pengaruh PNI yang lebih besar di pemerintahan, terutama di Kementerian Perburuhan.

D. Persatuan Tani Indonesia

Organisasi tani yang menjadi organisasi massa seazas selanjutnya adalah Petani singkatan dari Persatuan Tani Indonesia. Petani didirikan di Kediri pada 28 Agustus 1948, namun organisasi satu – satunya organisasi massa seazas yang paling lemah dalam kerangka Front Marhaenis. Pada kongres keempatnya di Yogyakarta pada 23 – 25 Februari 1956, organisasi ini mengaku mempunyai 134 cabang. Namun sebagian besar cabang – cabang tersebut hanya diatas kertas, tidak lebih dari embel – embel cabang partai di tingkat daerah. Kebanyakan cabang ini berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Selatan. Dalam kongres ke empat, Bambang Murtioso, pemimpin muda Petani dari Sumatera Selatan, mengucapkan pidato yang menyerang pimpinan nasional Petani karena tidak berbuat apa pun untuk meningkatkan organisasi Petani di daerah. Bambang Murtioso dapat mengucapkan pidatonya tanpa rasa bersalah karena Petani di Sumatera Selatan pada saat itu adalah organisasi Petani di tingkat daerah yang paling aktif. Tiga puluh dua cabang di Sumatera Selatan merupakan utusan daerah terbanyak dalam kongres.

PERAN ORMAS SEAZAS PNI DALAM DINAMIKA INTERNAL PNI

A. Dinamika pada kepemimpinan Soewirjo

Pada 1957 dan awal 1958, usaha para pemimpin ormas untuk membawa perubahan ke dalam PNI dilaksanakan dengan membentuk gerakan pembaruan partai yang dipimpin Sarmidi. Meskipun setuju dengan kritik para pemimpin Partindo terhadap PNI, mereka menolak masuknya Partindo antara lain karena mencurigai motif beberapa pemimpinnya dan juga karena merasa bahwa cita – cita mereka akan lebih mudah terpenuhi dengan tetap berusaha melakukan perubahan dari dalam. Kegagalan usaha mereka pada 1957 dan 1958 antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa wakil ormas di dewan pimpinan pusat PNI pada umumnya terlalu sedikit. Di DPP PNI misalnya, tidak ada pimpinan ormas, hanya dua mantan pimpinan ormas, Soebagio Reksodipoero dan Isnaeni (Keduanya pemimpin PDI dia 1950an) yang sangat dekat hubungannya dengan unsur-unsur konservatif. Hanya ada sepuluh wakil ormas diantara 82 anggota BPK (Badan Pekerja Kongres).

Usaha para pemimpin ormas untuk pembaruan partai gagal antara lain karena sejak 1956 sampai 1958 mereka tetap bergantung pada partai dalam hal keuangan, jabatan dan pengaruh umum dalam pemerintahan, yang memang diperlukan bagi usaha organisasi – organisasi tersebut. Misalnya, pada 1956 sebagian besar anggaran DPP KBKI dibiayai dengan pemberian Cuma – Cuma sebesar Rp 20.000 per bulan dari DPP PNI. Ketergantungan pada sumber partai ini dihapuskan kira – kira pada akhir 1957 dan selama 1958 setelah ormas berperan serta dalam berbagai badan koperasi golongan fungsional angkatan bersenjata dan FNIB. Yang lebih penting, pengangkatan

Ahem Erningpradja, Sadjarwo, Ruslan Abdulgani dan Notohamiprojo sebagai menteri dalam kabinet karya memberkan sumber kekuasaan baru dan pengaruh dalam pemerintahan pusat kepada ormas PNI, yang tidak diperolehnya dari partai.

Tumbuhnya kekuatan ormas yang menandingi kekuatan partai tergambar jelas pada maret 1960 ketika beberapa pemimpin ormas yang lebih radikal, diantaranya Surachman (Petani), Bachtiar Salim Haloho (KBKI), Suwardi (PDI), dan Sutanto Dirjosuparto (GMNI) ditarik kedalam parlemen baru, padahal mereka tidak termasuk daftar yang disampaikan DPP PNI. Meskipun PNI diperkenankan menempatkan beberapa orang partai di DPR – GR sebagai wakil golongan fungsional, empat ormas PNI yang besar tersebut diberi jatah dua puluh tiga kursi sendiri. Ini hasil penting, karena meskipun sepuluh orang ormas ditarik ke dalam parlemen pada 1956, kebanyakan mereka adalah orang tua yang karier dan pandangan politiknya tidak banyak berbeda dari pimpinan konservatif partai. Dalam hal ini, hasil ormas semakin mendapatkan bobot karena nasib para pemimpin partai konservatif kian memudar. Tersingkirnya mereka dari kabinet karya dan dilarangnya pegawai negeri tingkat atas menjadi anggota partai sangat merugikan para pemimpin partai dalam hubungan mereka dengan ormas. Larangan tersebut secara langsung menguntungkan ormas karena partai, dalam usaha menghindari akibat larangan tersebut, mendesak pegawai negeri yang terkena aturan untuk masuk kedalam ormas. Usaha ormas untuk melawan campur tangan para pemimpin konservatif partai atas urusan ormas mendapatkan banyak bantuan dari keputusan DPP PNI pada pertengahan agustus 1959. Keputusan ini membebaskan ormas dari semua ikatan resmi dengan partai.

PNI mengalami perkembangan yang pesat ketika Presiden Soekarno dan Angkatan Bersenjata mendorong pertumbuhan golongan fungsional sebagai lembaga perwakilan alternatif. Lebih khusus lagi, Soekarno berupaya meningkatkan kekuasaan ormas PNI karena dia tidak puas dengan pimpinan konservatif partai. Sebaliknya, para pemimpin ormas berusaha keras untuk memaksakan perubahan dalam kebijakan PNI. Ketika para pemimpin yang lebih konservatif dalam DPP PNI bermain – main dengan kemungkinan ikut serta atau sekurang – kurangnya membantu liga demokrasi pada mei 1960 misalnya, para pemimpin ormas seperti A.M Datuk (KBKI), Bambang Kusnohadi (GMNI), Hikmatullah (PDI) dan Surachman (Petani) memaksa Soewirjo yang terombang ambing untuk menanda tangani pernyataan mengutuk liga. Pada bulan – bulan sebelum kongres PNI kesembilan, para pemimpin ormas sibuk menyiapkan upaya perubahan dalam pimpinan partai. Untuk maksud ini, mereka menyiapkan pamphlet yang menyerang kebijakan pimpinan PNI 1956-1960 untuk dibagi – bagi pada saat berlangsungnya kongres.

Pamphlet berjudul Appeal Djuli 1960 ini biasa disebut buku merah karena sampulnya merah dan arena para pemimpin konservatif ingin melecehkan bahwa

buku tersebut diilhami oleh komunisme, isinya melanjutkan titik dimana gerakan pembaruan Sarmidi dan Partindo berhenti, tetapi dengan sebuah perbedaan, dalam arti pembentukan Partindo merupakan akhir dari satu tahap gerakan pembaruan partai. Misalnya kritik para pemimpin Partindo terhadap PNI dan para pemimpinnya tidak jauh berbeda dari kritik GMNI dan PDI. Namun dengan membentuk partai baru dan lebih penting, dengan kegagalan untuk menarik dukungan yang cukup besar, para pemimpin Partindo membawa pembaruan PNI menuju jalan buntu. Buku merah menjadi penting karena, dengan peristiwa liga demokrasi, untuk pertama kalinya para pemimpin ormas – ormas besar PNI berkumpul bersama sehingga pengaruh mereka kian terasa di dalam partai.

Buku merah mengulangi lagi semua penyebab memudarnya nasib baik partai yang kini menjadi lazim dan sebenarnya sudah dilihat Sarmidi pertama kali pada akhir 1956. Buku itu menggambarkan contoh – contoh khusus mengenai kesalahan perhitungan DPP pada tahun – tahun yang silam. Mereka menyalahkan DPP karena tidak melaksanakan dukungan resmi DPP terhadap konsepsi Soekarno dengan tindakan yang nyata.

B. Dinamika pada masa kepemimpinan Ali Sastroamidjojo

Dalam pidato pembukaannya pada hari kongres pertama 25 juli 1960 di solo, Soewirjo mendapat tugas yang kurang menyenangkan karena harus meninjau kembali peristiwa peristiwa yang membawa kemunduran partai selama 4 tahun terakhir. Seluruh pidatonya bernada kecewa yang mendalam. PNI katanya telah mendukung konsepsi demokrasi terpimpin tetapi dengan pengertian bahwa “ perhatian dipusatkan pada demokrasi dan bukan pada terpimpin”. Dia mengatakan bahwa pembentukan kabinet non partai, peraturan yang melanggar pegawai tinggi menjadi anggota partai, berbagai keputusan kabinet tentang pemerintahan daerah dan kebijakan ekonomi yang dibuat tanpa berunding dengan parlemen, dan akhirnya pembubaran parlemen itu sendiri, semuanya adalah contoh berbahaya yang memperkosa UUD 1945. Selain menyuarakan serangkaian keluhan, pidato Soewirjo tidak menawarkan apapun. Dia tidak mengajukan penjelasan sedikitpun mengapa musibah – musibah ini menimpa PNI. Ia juga tidak mencari alasan atau penyebab kemerosotan partai dari dalam partai sendiri. dan yang terpenting dari semuanya, ia tidak menawarkan sedikitpun gagasan mengenai strategi baru pada partai, atau bagi pembangunan partai kembali dan puing – puing masa lalu.

Laporan sekretaris jenderal Manuaba juga tidak lebih baik. Tampak jelas ada nada pembelaan diri dan pembenaran diri sendiri. dia memberikan alasan tentang kemerosotan partai dalam 4 tahun terakhir sebagai akibat “ peristiwa diluar kendali kita “, akibat “ terbatasnya sumber – sumber daya yang diperoleh DPP”. Untuk menjamin kelangsungan hidup partai, kata Manuaba, DPP harus mengambil keputusan atas dasar “ pertimbangan – pertimbangan praktis “. Sekiranya ditemukan kegagalan sepanjang 4 tahun terakhir, kongres

harus mencari, katanya, bukan saja didalam DPP, tetapi juga dalam pimpinan partai tingkat daerah dan dalam kenyataannya, dalam jutaan anggota partai semuanya.

Rapat – rapat kongres dan pertemuan BPK sebelumnya yang membahas pidato Soewirjo serta laporan sekretaris jenderal berlangsung tegang dan bertele – tele. Utusan dari beberapa cabang partai juga para pemimpin partai tingkat nasional seperti Iskaq Cokroadisurjo dengan tajam mengkritik DPP karena menyerah pada tekanan Sukarno dan angkatan darat. DPP, kata mereka seharusnya menolak berperan serta dalam DPR GR dan berupaya melawan serangan anti partai baik di Jakarta ataupun di daerah. Disisi lain spectrum politik ini, para pemimpin partai kiri dan wakil - wakil ormas di BPK mengedepankan persoalan – persoalan yang diungkit *buku merah*.

Tanggapan DPP yang diberikan Hardi merupakan tema yang lazim sekarang ini, yaitu DPP dalam kenyataannya menolak tekanan angkatan darat Sukarno, tetapi karena sebagian besar peristiwa terjadi diluar kendali partai, DPP harus berkompromi untuk menjamin kelangsungan hidup partai. Kalau DPP keras kepala, katanya “ kita tidak akan di izinkan mengadakan pertemuan BPK atau kongres ini “. Akhirnya, karena sebagian besar pemimpin partai mengakui bahwa jenis perlawanan yang diusulkan Iskaq dan yang lainnya sama sekali tidak mungkin diterapkan karena adanya kelemahan partai, dan di pihak lain, karena mereka tidak bersedia menerima perubahan drastic dalam ideologi dan pimpinan partai sebagaimana dituntut buku merah, dicapailah kompromi atas masalah utama yang menuntut keputusan kongres. Bagian – bagian lainnya diselesaikan dalam pertemuan BPK, bahkan sebelum kongres dibuka. Hal yang paling penting dalam kompromi tersebut berkenaan dengan susunan DPP. Ketika pemilihan berlangsung pada hari terakhir kongres, Ali Sastroamidjojo dicalonkan oleh Sembilan Dewan Partai Daerah, Soewirjo oleh dua DPD, dan Gani oleh satu DPD. Hasil Pemilihan tersebut member Ali 721 Suara, Soewirjo 421, dan Gani 56. Maka, Soewirjo terpilih menjadi Wakil Ketua satu dan Dr. Isa menjadi wakil ketua dua. S. Hadikusumo dipilih menjadi bendahara DPP secara aklamasi. Namun pemilihan sekretaris jenderal menjadi pertarungan sengit. Hasilnya Hardi menang tipis (440 suara) atas Soediro (413 suara), dan Osa Maliki yang menyusul menjadi calon kuat nomor tiga dengan 346 suara.

Pemilihan Ali merupakan unsur yang menentukan kompromi yang dicapai pada pertemuan BPK. Meskipun Ali adalah sekutu dekat faksi Sidik pada masa kabinet pertama yang dipimpinnya pada 1953, dia turut ambil bagian dalam keputusan meninggalkan strategi Sidik ketika PNI memutuskan bekerja sama dengan Masyumi dalam Kabinet Ali kedua. Pencalonannya diajukan oleh para pemimpin ormas karena mereka sadar bahwa mereka tidak punya cukup pengaruh di organisasi partai tingkat daerah untuk mengajukan seorang calon dari kalangan mereka sendiri. Dengan reputasinya sebagai seorang pemimpin gerakan nasionalis sebelum perang dan sebagai perdana menteri dalam dua kabinet, Ali

justru mempunyai bekal tanggung jawab dan ketangguhan yang cukup untuk memenangkan suara para pemimpin cabang partai. Ketidak hadirannya di tanah air karena menjadi duta besar Indonesia untuk PBB sejak pertengahan 1957 sampai awal 1960 telah menyelamatkannya dari pertikaian dalam pimpinan partai sepanjang masa itu, dan yang juga penting, menjauhkannya dari kegagalan pimpinan partai.

Ali sudah membuat persiapan yang baik buat pencalonannya. Dia sudah memperoleh dukungan dari para pemimpin ormas dengan menjanjikan akan mengubah kebijakan PNI dan melaksanakan pembaruan partai. Tetapi dia juga berhati – hati untuk tidak terlalu dekat dengan gagasan – gagasan mereka yang dapat membuat ia dibenci para pemimpin partai yang melihat para pemimpin muda ormas sebagai orang baru yang tidak setia. Sepanjang dua bulan menjelang kongres, Ali melakukan perjalanan keliling ke cabang – cabang partai di seluruh Indonesia untuk berbicara dengan pemimpin partai tingkat daerah.⁷² Dalam pertemuan BPK dan siding – siding awal kongres, dia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang berpandangan ke depan, yang bersedia menghadapi Demokrasi terpimpin dan lembaga – lembaga baru dengan semangat dan bukan dengan sikap lelah, mengalah dan membenarkan diri sendiri seperti Soewirjo. Jika Soewirjo dan para pemimpin lain dari DPP lama tetap memberikan peringatan tentang bahaya komunisme, Ali mengatakan bahwa PNI tidak perlu takut kepada PKI. Malah, PNI harus bersaing dengan PKI untuk merebut massa dengan memperbaiki kerja ormas PNI. Pimpinan harus berupaya memperbaiki hubungan dengan Presiden, Partai akan berhasil melaksanakannya, katanya, hanya kalau Soekarno yakin bahwa PNI bisa menggagal kembali kekuatan dari dalam dirinya sendiri.

Pencalonan Ali bukan tanpa tentangan. Dalam konferensi yang diselenggarakan dua minggu sebelum kongres, DPD Jawa Tengah yang kuat di bawah pimpinan Hadisoebeno memutuskan berusaha memilih kembali Soewirjo. Tetapi dalam kongres itu sendiri, Hadisoebeno tidak bisa mengendalikan cabang – cabang di bawah dewannya sendiri. Kedudukan Hadisoebeno di PNI Jawa Tengah diperlemah oleh percekocokan mengenai pencalonannya untuk menjadi kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah. Untuk tujuan ini, ia harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai pada 30 Oktober 1959. Kedudukan Hadisoebeno sebagai ketua PNI Jawa Tengah kemudian digantikan Soetjipto.

Ketika Hadisoebeno gagal terpilih sebagai kepala daerah, cabang – cabang partai yang mendukungnya berhasil mengembalikan Hadisoebeno sebagai ketua dalam konferensi PNI Jawa Tengah pada 9 – 10 Juli 1960. Hal ini membuat gusar cabang – cabang yang mendukung Soetjipto. Akhirnya, cabang – cabang Jawa Tengah secara bersama – sama menolak memberikan suara dalam kongres kesembilan. Setelah kongres tersebut berakhir, Soetjipto mengundurkan diri dari DPD Jawa Tengah. Keadaan yang sama terjadi juga pada PNI Jawa Timur. Para pemimpinnya menentang Ali tetapi banyak cabangnya membelot ke kubu Ali. Hal ini disebabkan DPD Jawa Timur pada saat itu dikuasai para pemimpin konservatif seperti Miarso dan Soendoro

S.H. Di Jawa Barat, Ali mendapat dukungan dari Osa Maliki, yang berusaha meredakan pengaruh para pemimpin yang pro – Soewirjo seperti Wilopo dan Soebagio Reksodipoero. Dengan perolehan suara yang banyak di wilayah ini, ditambah dukungan kuat dari DPD seperti Yogyakarta dan Sumatera Utara, Ali memenangkan mandat yang membuat kedudukannya sangat kuat di DPP yang baru.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan yang antara lain sebagai berikut :

Partai Nasional Indonesia sebagai partai yang menggunakan Marhaenisme sebagai ideologi partai. Penerapan Marhaenisme dalam tubuh Partai Nasional Indonesia mengharuskan pengorganisasian massa sampai tingkat akar rumput. Selain itu kebutuhan akan pundi – pundi suara dalam pemilu 1955 juga menjadi faktor dibentuknya ormas – ormas seperti Pemuda Demokrat Indonesia, Persatuan Tani Indonesia, Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang selanjutnya di akui sebagai ormas seazas.

Di dalam tubuh Partai Nasional Indonesia sejak awal berdiri kembali di tahun 1946 telah terbagi faksi di dalam tubuh partai. Faksi di dalam tubuh partai ini diwakili dua kelompok, yang pertama faksi konservatif yang di motori tokoh seperti Wilopo dan faksi radikal yang di motori oleh Sarmidi Mangunsarkoro. Faksi konservatif ini banyak terdiri dari para pegawai negeri atau pengusaha, sedangkan faksi radikal banyak terdiri dari para tokoh lokal yang banyak bersentuhan langsung dengan basis massa.

Keretakan didalam tubuh PNI menguat setelah perumusan indoktrinasi Marhaenisme sebagai bahan acuan partai mengalami penolakan oleh Soekarno, yang diangkat sebagai bapak Marhaenisme dalam kongres PNI kesembilan. Meskipun indoktrinasi ini tetap dicetak dan disebarkan banyak keraguan atas bahan indoktrinasi ini, terutama dari kalangan ormas partai se-azas. Kepemimpinan Soewirjo sebagai ketua PNI tahun 1956-1960 mengalami kemunduran yang banyak. Mulai kekalahan telak pada pemilu daerah pada tahun 1957 dan juga sikap partai yang tidak mendukung peraturan presiden yang melarang pegawai negeri untuk menjadi anggota partai. Selain itu para aktivis ormas juga mulai melakukan tekanan yang akhirnya memuncak pada terbitnya buku merah yang di bagikan saat kongres PNI kesembilan.

PNI sejak kepemimpinan Ali pada periode pertama dan kedua, melakukan pembenahan dan pengetatan partai. Mulai tingkat pelatihan kader ormas hingga partai secara berkala, Pembenahan administrasi partai juga dilakukan oleh Ali pada periode pertama. Setelah Kongres kesepuluh, Ali sebagai ketua dan Surachman sebagai sekjend melakukan pembersihan partai dari unsur – unsur konservatif secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- Deppenprop DPP PNI. PNI dan Perdjongannya. Jakarta Sulindo, 1960
 Deppenprop DPP PNI. Sekitar Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II. Jakarta : Sulindo, 1960
 Deppen. Wedjangan P.J.M Presiden Soekarno pada resepsi pembukaan kongres PNI ke IX. Solo : Fadjar 1963
 DPP PNI. Dasar dasar Pokok Marhaenisme. Jakarta : Sulindo, 1961
 DPP PNI. Keputusan – Keputusan Sidang BPK ke I PNI, tgl. 21s/d 23 Agustus 1961. Jakarta : Sulindo, 1962
 Presidium GMNI. Anggaran Dasar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. (Jakarta: Sinda, 1960),

B. Surat Kabar

- Abadi 24 Januari 1956, 8 Februari tahun 1956
 Abadi tanggal 1 agustus, 22 agustus, 23 oktober, 13 Desember 1955
 Merdeka tanggal 29 Oktober, 8 November tahun 1955
 Merdeka, tanggal 19,20 Januari , 23 Februari, 7 Maret, 17 Maret 1956
 Merdeka, tanggal 27 Juli dan 1 , 2, 12 agustus tahun 1955

C. Buku

- _____. (2012) Metode Penelitian Sejarah, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
 _____. (2001) Pengantar Ilmu Sejarah (cet. IV). Yogyakarta: Bentang Budaya.
 Aboe Bakar Loebis. Kilas Balik Revolusi. Jakarta: UI Press, 1995
 Ali Sastroamidjoyo. (1954). Pendapat Pemerintah terhadap Mosi Mr. Jusuf Wibisono. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.
 Amal, I. Teori – teori partai Politik. Yogyakarta : Tiara Wacana. 2000
 Anderson, Ben. Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988
 Budiajo, Miriam S. Dasar – dasar ilmu politik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2012
 Budiarto Miriam S. 1981. The Provisional Parliament Of Indonesia , Far Eastern Survey, XXV:2.
 Budiyo, Kabul. Teori dan Filsafat Ilmu Politik. Bandung : Alfabeta. 1999.
 Castles, Lance dan Feith, Herberth (ed). 1988. Permikiran Politik Indonesia 1945- 1965. Jakarta: LP3ES
 Daniel S. Lev. 1990. The Political Parties in Indonesia, Journal of Southeast Asian Studies.
 Deliar. Noer dan Akbarsyah. KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) Parlemen Indonesia 1945-1950. Jakarta: Yayasan Risalah, 2005
 Efendi, Sulaiman. Kiprah dan Pemikiran Politik. Jakarta : Ircisod. 2000.

- Finch, Susan dan Daniel S. Lev. Republic of Indonesia Cabinets 1945-1965. (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1957),
- H. Roslan. Abdulgani, 1961, Penjelasan Manipol-Usdek, Bahan-bahan Indoktrinasi. A. Reachim. Djember: Penerbit Sumber Ilmu
- Herbert Feith, The Decline Of Constitutional democracy in Indonesia (Jakarta : Equinox Publishing), 2000
- Hidayat, Imam. Teori – teori politik. Yogyakarta : Avepress. 2002.
- Ingelson, John, Jalan ke Pengasingan. (Jakarta : LP3ES), 1982
- Isa, Mohammad. PNI dan Berdikari. (Jakarta: Eka Grafika, 1965),
- J. Eliseo Rocamora. 1991. Nasionalisme Mencari Ideologi, bangkit dan runtuhnya PNI 1946-1962 (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti)
- J. Eliseo Rocamora. 1995. The Party National Indonesia. (South East Asia Publishing, Cornell University).
- Kahin, McTurnan George. Nasionalisme & Revolusi Indonesia. Depok : Komunitas Bambu. 2013
- Liddle, R. William. Ethnicity, Party and National Integration – An Indonesian Case Study (New Haven: Yale University Press, 1970),
- Maliki, Osa. Pidato Dan Propaganda. (Jakarta: Sinda, 1958)
- Melik, Sayuti. Antara Marhaenisme dan Marxisme. (Jakarta: Pembimbing Rakyat, 1958),
- Pembina Rakyat. Perdjoangan PNI dalam Parlemen. (Malang: Paragon, 1951),
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Notosusanto, Nugroho. (ed). 1984. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6. Jakarta: Balai Pustaka
- Reid, Anthony. Revolusi Nasional Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Rex, Mortimer, 2011, Indonesian Communism Under Soekarno (Idiologi dan Politik 1959-1965), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sandra. Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia. (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1961),
- Sitepu. P Antonius. Teori – teori Politik. Jakarta : Graha Ilmu. 2010
- Sukarno, Di bawah Bendera Revolusi, (Jakarta : Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi), 1967
- Tedjasukmana, Iskandar. The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement. (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1959),
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi UNESA. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi (Program Sarjana Strata Satu (S1) Universitas Negeri Surabaya. Surabaya, 2011
- Varma, S. P. Teori Politik Modern. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Wahono, Iskandar. Lahirnja KBKI. (Jakarta: Sulindo, 1956),
- Wilopo. Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya. Jakarta: Yayasan Idayu, 1976.